

RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS SOSIAL

KOTA PALANGKA RAYA

**Jalan Ir. Soekarno Komplek
Perkantoran G.Obos
Palangka Raya**

KATA PENGANTAR

Renja SOPD disusun oleh masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perubahan SOPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Dokumen Renja Perubahan SOPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SOPD. Kualitas dokumen Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan SOPD sangat ditentukan oleh kemampuan SOPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SOPD.

Demikian Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Palangka Raya disusun dengan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Murni untuk pengimplementasian program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Palangka Raya, September 2021

Kepala Dinas Sosial
Kota Palangka Raya

NYTA BIANITA REZZA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 198911 2 001

DAFTAR ISI

	halaman
SAMPUL DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.....	7
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB IV PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan TW II.....	7
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	17
Tabel 3.1 Keterkaitan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2021 dengan Prioritas RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya.....	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2021. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk

mewujudkan Visi Kepala Daerah “Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk Semua“ yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018-2023.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kota Palangka Raya dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Palangka Raya pada tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Perubahan SOPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan peraturan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
- 19) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
- 20) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
- 21) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

- 22) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
- 23) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2021, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk satu tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis; dan
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Berikut adalah uraian pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021 Sampai dengan Triwulan II sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Sisa target realisasi
				I		II		6		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4		5		6		7
Semua Bidang										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100	6.499.925.629					-	2.307.448.181	4.192.477.448
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen SAKIP yang Terpenuhi (%)		39.356.251						18.721.250	20.635.001
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	76	18.395.313	14	-	14	10.293.750	28	10.293.750	8.101.563
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (Dokumen)	35	20.960.938	6	-	6	8.427.500	12	8.427.500	12.533.438
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Terpenuhi (%)		4.747.101.072						2.027.425.400	2.719.675.672
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji (Bulan)	12	4.727.604.133	3	753.437.078	3	1.270.143.322	6	2.023.580.400	2.704.023.733
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun (Laporan)	3	19.496.939	-	-	1	3.845.000	1	3.845.000	15.651.939
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang Disiplin dan Berkapasitas (%)		133.532.334						-	133.532.334

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut yang dibeli (orang)	60	65.925.000	-	-	-	-	-	-	65.925.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan formal dan pendidikan (Orang)	10	67.607.334	-	-	-	-	-	-	67.607.334
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi (%)		464.515.682					71.020.283		393.495.399
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli (Jenis)	8	5.069.875	-	-	3	448.000	3	448.000	4.621.875
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibeli (Item)	60	36.566.532	-	-	55	14.105.000	55	14.105.000	22.461.532
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan (Lembar)	72698	33.519.375	-	-	2.500	4.800.000	2.500	4.800.000	28.719.375
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli (Eksemplar)	84	19.665.000	-	-	42	5.040.000	42	5.040.000	14.625.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli (Bulan)	12	18.960.000	3	-	3	3.492.500	6	3.492.500	15.467.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Kedinasan Lainnya yang diadakan diluar daerah (bulan)	12	350.734.900	3	-	3	43.134.783	6	43.134.783	307.600.117
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksan (%)		220.145.040						-	220.145.040
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli (Unit)	17	52.837.500	-	-	-	-	-	-	52.837.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli (Unit)	6	133.682.540	-	-	-	-	-	-	133.682.540
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli (Jenis)	5	33.625.000	-	-	-	-	-	-	33.625.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia (%)		637.037.250						131.995.580	505.041.670

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Setiap Bulan (Bulan)	12	105.904.000	3	-	3	34.939.002	6	34.939.002	70.964.998
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM kebersihan yang terbayar (bulan)	12	531.133.250	2	21.228.471	3	75.828.107	5	97.056.578	434.076.672
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)		258.238.000						58.285.668	199.952.332
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (Unit)	8	189.668.000	-	-	8	32.985.668	8	32.985.668	156.682.332
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (Unit)	2	51.750.000	-	-	2	21.750.000	2	21.750.000	30.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (Jenis)	10	16.820.000	-	-	4	3.550.000	4	3.550.000	13.270.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS (%)	80	217.499.750					36	5.725.000	211.774.750
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi sosial/kelompok sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penertiban undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang (%)		7.045.000						-	7.045.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah organisasi sosial/kelompok sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penertiban undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang (Organisasi)	10	7.045.000	-	-	5	-	5	-	7.045.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS (%)		210.454.750						5.725.000	204.729.750

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peksos, PSM, dan Penyuluh sosial yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya (Orang)	79	148.178.750	-	-	40	2.972.500	40	2.972.500	145.206.250
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya (Orang)	5	20.525.000	-	-	-	-	-	-	20.525.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan (Orang)	15	35.526.000	-	-	-	2.752.500	-	2.752.500	32.773.500
	Jumlah PSKS kelembagaan yang mendapatkan pembinaan (Lembaga)	30		-	-	5		5		-
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam penanganan PPKS/PMKS (Orang)	20	6.225.000	-	-	-	-	-	-	6.225.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	50	239.594.000					20,11	6.723.600	232.870.400
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS SPM yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan (%)		213.696.375						6.723.600	206.972.775
Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS SPM yang mendapat bantuan permakanan (Orang)	50	70.839.375	-	-	-	-	-	-	70.839.375
Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS SPM yang mendapatkan bantuan sandang (Orang)	30	14.870.000	-	-	-	-	-	-	14.870.000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS SPM yang mendapatkan alat bantu (Orang)	5	10.500.000	-	-	-	-	-	-	10.500.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS SPM yang bertemu dengan keluarganya kembali (Orang)	15	15.956.250	-	-	-	-	-	-	15.956.250

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS SPM yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial (Orang)	45	72.278.250	-	-	30	6.723.600	30	6.723.600	65.554.650
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumah PPKS yang keluarganya mendapat peningkatan pemahaman (Orang)	15	19.096.250	-	-	-	-	-	-	19.096.250
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS SPM yang menerima layanan rujukan (Orang)	35	10.156.250	-	-	-	-	-	-	10.156.250
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS non SPM yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan (%)		25.897.625						-	25.897.625
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS non SPM yang mendapat bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial (Orang)	15	18.541.375	-	-	-	-	-	-	18.541.375
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS non SPM yang menerima layanan rujukan (Orang)	35	7.356.250	-	-	-	-	-	-	7.356.250
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial (%)	45	1.475.741.126						7.559.000	1.468.182.126
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima bantuan sosial sesuai DTKS (%)		1.475.741.126						7.559.000	1.468.182.126
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang terverifikasi dan Validasi (KK)	10885	350.006.126	-	-	-	1.677.000	-	1.677.000	348.329.126
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menerima bantuan sosial (Orang)	44000	115.735.000	-	-	42.000	5.882.000	42.000	5.882.000	109.853.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			1.010.000.000		-		-		-	1.010.000.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	80	1.124.936.000					0,73	4.535.692	1.120.400.308
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang terpenuhinya kebutuhan dasar (%)		1.065.964.750						3.326.000	1.062.638.750

Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan pangan (Orang)	100	40.953.750	-	-	20	783.000	20	783.000	40.170.750
Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang (Orang)	50	15.011.000	-	-	-	-	-	-	15.011.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan (Orang)	200	1.010.000.000	-	-	-	2.543.000	-	2.543.000	1.007.457.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase petugas dan masyarakat yang mampu menaggulangi bencana (%)		58.971.250						1.209.692	57.761.558
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)	25	58.971.250	-	-	-	1.209.692	-	1.209.692	57.761.558
TOTAL			9.557.696.505							7.225.705.032

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai lembaga untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan wajib pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Dalam Urusan Wajib Sosial menyelenggarakan fungsi Bidang Kesejahteraan Sosial, Pengelolaan pembinaan sosial, pengelolaan pemulihan sosial, pengelolaan pembinaan bantuan dan perlindungan sosial.

Sejalan dengan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Dinas Sosial Kota palangka Raya sebagai lembaga teknis pelaksanaan pelayanan mempunyai target dan realisasi sesuai dengan pelayanan SPM, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun									
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	91,38%	100%	100%	Pemenuhan indikator pendukung (output) yang menjadi pendorong pencapaian indikator utama (outcome) sesuai dengan pemenuhan indikator bidang sosial menurut perundang-undangan	
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti											
3	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti											
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti											

5	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ketercapaian penanganan korban bencana disesuaikan dengan kebutuhan dari korban bencana alam dan sosial serta kejadian bencana
---	---	--	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya Dinas Sosial Kota Palangka Raya khususnya dalam Penurunan jumlah PPKS mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kementerian Sosial RI. Dimana fungsi tugas pokoknya adalah masalah Sosial yang cakupannya luas, baik itu pelayanan jaminan sosial masyarakat, Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan PKH dan pelatihan bagi KUBE serta kesiapsiagaan bencana.

Banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya disamping keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, SDM yang masih kurang mendapatkan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi serta pengalaman yang masih terbatas sehingga ada beberapa fungsi dan tugas yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, namun patut disyukuri program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada umumnya berjalan dengan baik sehingga visi dan misi Kepala Daerah terhadap Program Nasional dapat dicapai walaupun belum maksimal.

Untuknya kedepannya Dinas Sosial berharap dapat menangkap peluang dan tantangan dalam era globalisasi yang menuntut keahlian dan pengalaman yang tinggi untuk dapat mencapai program kerja yang diharapkan sehingga program pelayanan bagi masyarakat dapat lebih maksimal dan diharapkan bidang Sosial menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintah dalam capaian Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Palangka Raya. Untuk itu, perlu dikembangkan program pelatihan bagi PPKS yang banyak diminati masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2023

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RKPD juga menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Program dan kegiatan prioritas daerah merupakan substansi RKPD Kota Palangka Raya, daftar yang disajikan meliputi nama program dan kegiatan yang diwujudkan dalam jumlah dana yang dibutuhkan, target dari pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan untuk RKPD Kota Palangka Raya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian target-target pembangunan nasional;
2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Fokus pada RPJPD 2008-2028 dan indikator kinerja RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
4. Memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
5. Mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah;
6. Pemerataan antar kecamatan dan atau kelurahan;
7. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
8. Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
9. Relevan terhadap isi strategis dan masalah mendesak pada masing-masing misi pembangunan yang faktual; dan
10. Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Perubahan, Dinas Sosial Kota Palangka Raya merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu		
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan
								Perubahan			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	80 %	80 %	5,559,657,551	6,626,735,629	6,494,213,420
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							18,867,500	37,167,938	41,356,251
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76 Dokumen	76 Dokumen	76 Dokumen		9,902,000	18,395,313	20,395,313
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen		8,965,500	18,772,625	20,960,938
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,868,763,783	4,746,155,759	4,522,101,072
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai yang menerima Gaji	Pegawai yang menerima Gaji	48 Bulan	48 Bulan	12 Bulan		3,858,931,331	4,727,604,133	4,502,604,133
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir tahun	Jumlah Laporan Akhir tahun	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		9,832,452	18,551,626	19,496,939
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							95,867,227	166,840,000	65,925,000

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atributnya yang dibeli	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atributnya yang dibeli	60 Orang	60 Orang	60 Orang	71,867,226	65,925,000	65,925,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Formal dan Pendidikan	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Formal dan Pendidikan	10 Orang	10 Orang	0 Orang	24,000,000	100,915,000	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah						479,567,379	514,157,282	280,985,312
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi listrik yang dibeli	Jenis Komponen Instalasi listrik yang dibeli	8 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	5,073,803	5,069,875	2,612,250
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	Jumlah ATK yang dibeli	60 Item	60 Item	60 Item	45,470,011	36,566,532	35,566,532
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	72698 Lembar	72698 Lembar	72698 Lembar	32,487,094	33,519,375	33,519,375
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli	84 Eksemplar	84 Eksemplar	84 Eksemplar	19,663,985	19,665,000	12,165,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,922,485	6,922,500	18,960,000
	Penyelenggaraan Rapat	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi, dan Kegiatan	Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi, dan Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	369,950,000	412,414,000	178,162,155

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kedinasan lainnya yang di adakan diluar Daerah	kedinasan lainnya yang di adakan diluar Daerah						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						214,950,000	234,025,000	732,170,535
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang dibeli	Jumlah Mebeleur yang dibeli	17 Unit	17 Unit	23 Unit	63,950,000	52,837,500	111,337,500
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibeli	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibeli	6 Unit	6 Unit	20 Unit	99,000,000	87,562,500	169,682,540
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibeli	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibeli	5 Jenis	5 Jenis	8 Jenis	52,000,000	93,625,000	451,150,495
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						686,641,664	625,329,250	610,037,250
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan	Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	103,760,000	105,904,000	105,904,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Keungan Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar	Jumlah Laporan Keungan Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	582,881,664	519,425,250	504,133,250
					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			
								195,000,000	303,060,400	241,638,000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	8 Unit	8 Unit	9 Unit	98,000,000	234,490,400	173,068,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	80,000,000	51,750,000	51,750,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	17,000,000	16,820,000	16,820,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	80 %	80 %	80 %	161,459,998	222,093,500	198,499,459
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						10,298,998	7,638,750	11,212,209
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan	Jumlah Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan	10 Organisasi Sosial	10 Organisasi Sosial	10 Organisasi Sosial	10,298,998	7,638,750	11,212,209

			Pengumpulan Uang atau Barang mendapatkan pembinaan dan	Pengumpulan Uang atau Barang mendapatkan pembinaan dan						
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						151,161,000	214,454,750	187,287,250
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peksos, PSM dan Penyuluh Sosial yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	Jumlah Peksos, PSM dan Penyuluh Sosial yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	79 Orang	79 Orang	79 Orang	115,338,000	148,178,750	129,978,750
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Potensi Tenaga Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Potensi Tenaga	Jumlah TKSK yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	Jumlah TKSK yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5,000,000	20,525,000	20,125,000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan	15 Orang 30 LKS	15 Orang 30 LKS	15 Orang 30 LKS	20,500,000	35,526,000	31,358,500
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan	Jumlah SDM LK3 yang memiliki kapasitas dan	Jumlah SDM LK3 yang memiliki kapasitas dan	20 Orang	20 Orang	10 Orang	10,323,000	10,225,000	5,825,000

	Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	kompetensi dalam penanganan PPKS/PMKS	kompetensi dalam penanganan PPKS/PMKS						
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	50 %	50 %	50 %	252,983,400	236,472,000	239,594,000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						222,432,400	212,224,375	213,696,375
	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS SPM yang mendapat bantuan Permakanan	Jumlah PPKS SPM yang mendapat bantuan Permakanan	50 Orang	50 orang	71 Orang	75,550,000	70,839,375	46,089,375
	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS SPM yang mendapat bantuan Sandang	Jumlah PPKS SPM yang mendapat bantuan Sandang	30 orang	30 orang	30 orang	14,950,000	14,870,000	23,370,000
	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS SPM yang mendapat Alat Bantu	Jumlah PPKS SPM yang mendapat Alat Bantu	2 Orang	2 Orang	27 Orang	10,150,000	10,500,000	17,300,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS SPM yang Bertemu dengan keluarganya Kembali	Jumlah PPKS SPM yang Bertemu dengan keluarganya Kembali	15 Orang	15 Orang	21 Orang	40,199,200	15,956,250	21,356,250
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS SPM yang Mendapatkan Bimbingan fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah PPKS SPM yang Mendapatkan Bimbingan fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	45 Orang	45 Orang	65 Orang	40,900,000	70,806,250	69,338,250

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PPKS yang keluarganya Mendapat Peningkatan Pemahaman	Jumlah PPKS yang keluarganya Mendapat Peningkatan Pemahaman	15 Orang	15 Orang	33 Orang	30,375,000	19,096,250	22,316,250
	Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS SPM yang Menerima Layanan Rujukan	Jumlah PPKS SPM yang Menerima Layanan Rujukan	35 Orang	35 Orang	15 Orang	10,308,200	10,156,250	13,926,250
	Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						30,551,000	24,247,625	25,897,625
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS Non SPM yang Mendapatkan Bimbingan fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah PPKS Non SPM yang Mendapatkan Bimbingan fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	15 orang	15 orang	15 orang	20,500,000	16,891,375	18,541,375
	Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS Non SPM yang Menerima Layanan Rujukan	Jumlah PPKS Non SPM yang Menerima Layanan Rujukan	35 Orang	35 Orang	5 Orang	10,051,000	7,356,250	7,356,250
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial	45 %	45 %	45 %	450,662,387	473,254,876	1,458,053,626
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						450,662,387	473,254,876	1,458,053,626

	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang Terverifikasi dan Validasi	Jumlah KK yang Terverifikasi dan Validasi	10885 KK	10885 KK	10885 KK	350,062,387	350,006,126	350,006,126
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang Terfasilitasi Menerima Bantuan Sosial PBI Jumlah Fakir miskin & Orang Tidak Mampu yang Menerima bantuan Sosial PKH Jumlah Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang Mendapatkan Pendampingan	Jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang Terfasilitasi Menerima Bantuan Sosial PBI Jumlah Fakir miskin & Orang Tidak Mampu yang Menerima bantuan Sosial PKH Jumlah Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang Mendapatkan Pendampingan	44000 Orang	44000 Orang	36505 Orang	100,600,000	123,248,750	98,047,500
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat rentan dan terdampak sosial yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah masyarakat rentan dan terdampak sosial yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	Orang	3700 Orang	0	0	1,010,000,000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya	80 %	80 %	80 %	1,083,050,057	1,124,936,000	2,142,336,000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						1,063,028,557	1,065,964,750	2,095,964,750
	Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	Jumlah korban Bencana yang menerima Bantuan Pangan	Jumlah korban Bencana yang menerima Bantuan Pangan	100 Orang	100 Orang	150 Orang	47,996,000	40,953,750	40,953,750
	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sandang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	15,032,557	15,011,000	15,011,000

	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yang menerima Bantuan Jumlah Masyarakat terdampak Covid-19 yang menerima Bantuan Sosial	Jumlah Korban Bencana yang menerima Bantuan Jumlah Masyarakat terdampak Covid-19 yang menerima Bantuan Sosial	200 orang	200 orang	150 orang	1,000,000,000	1,010,000,000	2,040,000,000
					Orang	Orang	2000 Orang			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						20,021,500	58,971,250	46,371,250
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang mendapatkan peningkatan Kapasitas	Jumlah TAGANA yang mendapatkan peningkatan Kapasitas	25 Orang	25 Orang	17 Orang	20,021,500	58,971,250	46,371,250
TOTAL								7,507,813,393	8,683,492,005	10,532,696,505

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial Kota Palangka Raya tidak ada usulan Program dari Musrembang atau Pokir yang terseleksi menjadi Program Usulan Masyarakat.

**BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PRANGKAT DAERAH**

**Tabel 3.1
Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2021 Dengan Prioritas RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
1	001	2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
1	6	1	2.01.1	1	Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen SAKIP yang Terpenuhi	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	76 Dokumen	76 Dokumen	100 %	100 %	18.395.313	20.395.313	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	9.902.000	
1	6	1	2.01.1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Dokumen SAKIP yang Terpenuhi	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	35 Dokumen	35 Dokumen	100 %	100 %	18.772.625	20.960.938	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	7.365.500	
1	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
1	6	1	2.02.1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Terpenuhi	Pegawai yang menerima Gaji	Persentase Laporan Keuangan yang Terpenuhi	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	48 Orang	12 Bulan	100 %	100 %	4.727.604.133	4.502.604.133	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	3.756.167.989	
1	6	1	2.02.1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Terpenuhi	Jumlah Laporan Akhir tahun	Persentase Laporan Keuangan yang Terpenuhi	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	18.551.626	19.496.939	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	9.832.452	
1	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
1	6	1	2.05.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase SDM yang Disiplin dan Berkapasitas	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atributnya yang dibeli	Persentase SDM yang Disiplin dan Berkapasitas	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	60 Orang	60 Orang	100 %	100 %	65.925.000	65.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	15.000.000	
1	6	1	2.05.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase SDM yang Disiplin dan Berkapasitas	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Formal dan Pendidikan	Persentase SDM yang Disiplin dan Berkapasitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	10 Orang	0 Orang	100 %	100 %	100.915.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	5.000.000	
1	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
1	6	1	2.06.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Jenis Komponen Instalasi listrik yang dibeli	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	8 Jenis	7 Jenis	100 %	100 %	5.069.875	2.612.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	6.073.803	
1	6	1	2.06.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Jumlah ATK yang dibeli	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	60 Item	60 Item	100 %	100 %	36.566.532	35.566.532	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	25.470.011	
1	6	1	2.06.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	72698 Lembar	72698 Lembar	100 %	100 %	33.519.375	33.519.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	32.487.094	
1	6	1	2.06.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	84 Eksemplar	84 Eksemplar	100 %	100 %	19.665.000	12.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	32.487.094	
1	6	1	2.06.1	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6.922.500	18.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	7.922.485	
1	6	1	2.06.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi, dan Kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar Daerah	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	412.414.000	178.162.155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	69.250.000	
1	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
1	6	1	2.07.1	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	Jumlah Mebeleur yang dibeli	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	17 Unit	23 Unit	100 %	100 %	52.837.500	111.337.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	48.750.000	
1	6	1	2.07.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibeli	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	6 Unit	20 Unit	100 %	100 %	87.562.500	169.682.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	50.000.000	
1	6	1	2.07.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibeli	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	5 Jenis	8 Jenis	100 %	100 %	93.625.000	451.150.495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	10.000.000	
1	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
1	6	1	2.08.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	105.904.000	105.904.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	103.760.000	
1	6	1	2.08.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	Jumlah Laporan Keungan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %		
1	6	1	2.08.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar					12 Bulan	12 Bulan			519.425.250	504.133.250			80 %	474.488.787	
1	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
1	6	1	2.09.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	8 Unit	9 Unit	100 %	100 %	234.490.400	173.068.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	98.000.000	
1	6	1	2.09.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	51.750.000	51.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	51.000.000	
1	6	1	2.09.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jenis Perengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	80 %	80 %	10 Jenis	10 Jenis	100 %	100 %	16.820.000	16.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	80 %	17.000.000	
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										222.093.500	198.499.458					80 %	56.679.997
1	002	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
1	6	2	2.02.1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	Jumlah Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	10 Organisasi Sosial	10 Organisasi Sosial	80 %	80 %	7.638.750	11.212.209	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	80 %	10.298.997	
1	002	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																			
1	6	2	2.03.1	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	Jumlah Peksos, PSM dan Penyuluh Sosial yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	79 Orang	79 Orang	80 %	80 %	148.178.750	129.978.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	80 %	20.169.000	
1	6	2	2.03.1	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	Jumlah TSKS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	5 Orang	5 Orang	80 %	80 %	20.525.000	20.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	80 %	5.000.000	
1	6	2	2.03.1	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	15 Orang	15 Orang	80 %	80 %	35.526.000	31.358.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	80 %	10.100.000	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2020 penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Target kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja dan rencana tindak lanjut Dinas Sosial Tahun 2018 – 2023 yaitu:

1. Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnyasecara wajar
3. Terwujudnya kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat.
4. Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur.
6. Meningkatnya prasarana dan sarana aparatur yang memadai.
7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
8. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana
9. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.
10. Terwujudnya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntable dan bebas dari unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Palangka Raya, September 2021

Kepala Dinas Sosial
Kota Palangka Raya

NYTA BIANITA REZZA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 198911 2 001